

Nomor : 68/ Surat Terbuka_JSJKK/II/2009

Jakarta, 19 Februari 2009

Hal : **Aksi Kamisan ke 100 kali:**

Pemerintahan SBY-JK Tetap Diam 1000 Bahasa

Kepada Yang Terhormat,

Presiden Republik Indonesia

Bapak Dr. H Susilo Bambang Yudoyono

Di- Jakarta

Hari ini adalah yang ke 100 kali, kami melakukan aksi diam kamisan di depan Istana Negara yang kita cintai. Perlu kami sampaikan, aksi ini sudah berjalan lebih dari 2 tahun terhitung dari tanggal 18 Januari 2007, hingga hari ini, 19 Februari 2009. Kami memahami, pencapaian 100 kali, tentu bukanlah jumlah yang sedikit dan waktu yang sebentar untuk sebuah penantian bagi keadilan keluarga korban pelanggaran HAM berat. Namun demikian, kami tidak memaknai aksi ini sebagai kelelahan dan ke sia-siaan semata, bagi kami, selain menegaskan semangat kita untuk terus melawan kekebalan hukum (*impunitas*) bagi pelanggar HAM, aksi ini juga membantu meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Untuk itu aksi diam kamisan ini akan terus berjalan dan menjadi inspirasi bagi perubahan. Gerakan ini lahir akibat masih buruknya sistem peradilan dan kebijakan negara yang tidak kunjung menghadirkan keadilan. Meski Presiden SBY pernah berkomitmen kepada kami, akan mendukung penuntasan kasus pelanggaran HAM berat yang disampaikan dalam pertemuan di Istana Negara 26 Maret 2008, namun hingga hari ini, tidak ada tindak lanjut. Justru sebaliknya, Jaksa Agung RI sebagai garda terdepan penegakan hukum dan DPR RI selaku wakil rakyat dan pembuat undang-undang, masih menjadi penghambat utama bagi penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak korban. Ini adalah bukti, bahwa 10 tahun reformasi, ternyata reformasi lembaga peradilan dan kebijakan yang menjunjung prinsip HAM, secara substansi tidak pernah terwujud. Kenapa demikian? Karena inti dari sebuah penegakan hukum adalah keadilan dan pentingnya menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti peristiwa 1965/1966, Penembakan Misterius (PETRUS) 1983-1985, Trisakti, Semanggi I & II, Tragedi Mei 1998, penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997-1998 hingga pembunuhan aktivis HAM, Munir 7 September 2004. Agenda kemanusiaan ini, tidak bisa ditawar lagi, harus menjadi agenda prioritas, khususnya untuk penyelesaian kasus masa lalu adalah bagian dari pengungkapan kebenaran (pelurusan sejarah), pemulihan hak korban dan memutus rantai kekerasan. Bukankan para pendiri bangsa Indonesia berkali-kali menegaskan, sebuah bangsa yang besar, adalah bangsa yang menghargai sejarahnya, bukan menodai sejarahnya.

Satu bulan lagi, kita akan menghadapi pemilu, untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) dan calon presiden dan wakil presiden. Momentum politik ini menghadirkan kabar gembira, ragu, sedih, khawatir dan sejuta rasa yang sulit digambarkan, seakan perubahan itu hanya fatamorgana. Kondisi demikian akibat tidak ada agenda keadilan dalam pemilu 2009. Partai politik peserta pemilu justru memberikan tempat bagi para pelanggar HAM dari insitusi sipil maupun militer sebagai caleg, bahkan pelanggar HAM berat, seperti Jendral Purn Wiranto, Prabowo, Tri Soetrisno dapat melenggang mulus membuat parpol, bahkan dengan modal yang dimilikinya, mereka mencuci dosa dan tangan berdarahnya dengan iklan di media cetak dan elektronik, seakan hendak menegaskan bahwa mereka adalah sosok pemimpin yang ideal. Mereka tidak ragu meneriakkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari agenda HAM, padahal mereka adalah pelaku pelanggaran HAM. Pertanyaan dasar kami, mampukah pemilu 2009 benar – benar menghadirkan perubahan yang mampu mengangkat keterpurukan rakyat ? Untuk itu, disisa waktu yang masih tersisa, kami berharap pemerintah tidak mengabaikan agenda penegakan HAM dan tetap menjadikan agenda ini sebagai prioritas pasca pemilu 2009, terlepas siapapun yang terpilih. Tetapi tentu saja bukan pelanggar HAM yang akan menyelesaikan PR ini, bagaimana mungkin, pelaku mengadili dirinya sendiri, bukankah negara kita ini bukan republik *dagelan*?

Demikian kami sampaikan surat kamisan yang ke 100 kali, semoga menjadi *cambuk* bagi pemerintah untuk memprioritaskan agenda penegakan HAM disisa waktu yang ada dan menjadi PR bagi pemerintah yang akan datang.

Jakarta, 19 Februari 2009.

JSKK

Sumarsih

Suciwati

Bejo Untung

Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Menteri Sekretaris Negara RI
2. Bapak Ketua Komnas HAM